



**KUMPULAN ABSTRAK JURNAL**

# **KOLEKSI E-DEPOSIT PERPUSTAKAAN NASIONAL**

*TEMA POLITIK*

*2020*



**PERPUSTAKAAN NASIONAL**  
REPUBLIK INDONESIA

**Penyusun : Catur Fitri Widiyawati**

**Penyunting : Elah Laelasari**

## **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

**Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas, Walid Mustafa Sembiring**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

**Kata kunci** : Peran; BPD; Pemerintahan Desa, Kabupaten Deli Serdang

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 4, No 2 (2016)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v4i2.454](https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/454>

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA / KONFLIK  
AREAL LAHAN**

**Ngadimin Ngadimin, Heri Kusmanto, Isnaini Isnaini**

**ABSTRAK**

Konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Utara yang telah berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa / konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh izin dari Menteri. Namun izin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya mencari solusi masih terus dilakukan dengan Kemendagri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut/pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan sehingga diperoleh kebenaran yang objektif untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

**Kata kunci** : Peran Pemerintah, Konflik Pertanahan, Lahan, Sumatera Utara

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 6, No 1 (2018)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v6i1.1519](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1519)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519>

**HASHTAG #2019GANTIPRESIDEN : SENTIMEN ANTI-PETAHANA  
DAN ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA MENGHADAPI  
PILPRES 2019 DI PEMATANGSIANTAR**

**Erond Litno Damanik**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menganalisis Komparasi Teori Marketing Politik 4P Menurut Niffenegger dan 3P Menurut Adman Nursal. Yang pertama yaitu marketing politik yang menggunakan teori strategi pendekatan pasar (Nursal 2004) yang dikenal dengan istilah 3P yaitu Pull Marketing, Push marketing, dan Pass marketing. Kemudian yang kedua yaitu marketing politik yang menggunakan teori bauran marketing atau marketing-mix (Niffenneger 1989) atau 4P yaitu product, promotion, price dan place. Artikel ini akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua teori tersebut. Konsep marketing yang diadaptasi dalam dunia politik, dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas transfer ideologi dan program kerja, dari kontestan ke masyarakat dalam sebuah kampanye. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori dapat saling melengkapi di lapangan. Teori Niffenneger untuk memahami peta pemasaran politik. Sedangkan teori adman nursal lebih kepada teknik promosi kandidat di akar rumput.

**Kata kunci** : Marketing Politik, Kampanye, Pemilihan Umum

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 6, No 2 (2018)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v6i2.1996](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1996)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1996>

## **AFFIRMATIVE ACTION : RESERVATION SEATS UNTUK PEREMPUAN DI PARLEMEN INDIA**

**Evi Yunita Kurniaty**

### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk membantu kita memahami dan mengkaji usaha kaum perempuan dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi politik mereka di dalam proses konstitusi dan pemilu. Kita juga dapat melihat sejauh mana nilai-nilai budaya patriarki mengakar di dalam suatu masyarakat dan apa yang dapat dilakukan dan mengurangnya. Affirmative action yang dilakukan di India dengan menerapkan sistem reservation seats untuk perempuan di Parlemen India. Hal tersebut dilakukan India terbukti dapat meningkatkan jumlah perempuan di parlemen India. Dengan cara diberlakukan kuota untuk perempuan sebagai strategi memasuki arena politik mendapat dukungan yang kian meluas di kalangan anggota parlemen. Dalam penelitian ini, Indonesia bisa mendapatkan pembelajaran mengenai sistem reservation seats yang dilakukan. Untuk meningkatkan keterwakilan di "wilayah" yang sangat sulit disentuh oleh sistem kuota yang dijalankan sekarang, maka dapat dilakukan kuota dengan reservation seats ini untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam parlemen.

**Kata kunci** : Kuota, Parlemen Perempuan, India.

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 3, No 2 (2015)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v3i2.904](https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i2.904)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/904>

# **PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK**

**Payerli Pasaribu**

## **ABSTRAK**

Partai politik adalah kelompok yang terorganisasi dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dari cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan salah satu instruksi inti dari demokrasi modern. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representatif*), baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPRD/DPR) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam instruksi kepartaian. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajar orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian turut berpartisipasi politik. Inilah yang menjadi peran penting dalam partai politik untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat.

**Kata kunci** : Peranan; Partai Politik; Pendidikan Politik

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 5, No 1 (2017)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v5i1.1125](https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1125>

**MODEL POLITIK PEMBANGUNAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN ISLAM MUHAMMADIYAH DAN  
AL WASHLIYAH DI KOTA MEDAN**

**Heri Kusmanto, Warjio Warjio**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas model politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam yakni Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan. Secara spesifik penelitian ini menjelaskan tentang politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam (Muhammadiyah dan Al-Washliyah) dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dalam aktivitas pembangunan di Kota Medan. Konteks penelitian yang dilakukan terutama menyangkut orientasi kedua organisasi kemasyarakatan Islam yang dikenal memiliki aliran pemikiran berbeda satu sama lain, Muhammadiyah mewakili pemikiran modern dan Al-Washliyah mewakili kalangan tradisional. Penelitian ini mengkaji bentuk atau model maupun strategi pembangunan, serta arah ataupun orientasi yang menjadi dasar kebijakan politik pembangunan kedua organisasi kemasyarakatan tersebut. Hal ini tentu saja akan mengalami perbedaan dengan yang selama ini dikembangkan oleh kalangan pemerintahan yaitu cenderung membangun dengan pendekatan sekular yang sangat dirasakan telah mensejahterakan masyarakat disatu sisi tapi disisi lain telah menimbulkan paradoks seperti kemiskinan, ketimpangan dan degradasi moral.

**Kata kunci** : Politik Pembangunan, Organisasi Kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah dan Al-Washliyah

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 6, No 2 (2018)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v6i2.2008](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.2008)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2008>

# **KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANTAI LABU PEKAN**

**Nur'aini Muslim, Irwan Nasution**

## **ABSTRAK**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (2) Kendala dan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu, (3) Upaya penanggulangan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisi data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat desa setempat. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Aparatatur Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu ditinjau dari proses penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreativitas dan tanggung jawab belum mampu memberikan pelayanan maksimal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci** : Kinerja, Aparat Desa, pelayanan, Kabupaten Deli Serdang

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 2, No 2 (2014)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v2i2.915](https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.915)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/915>



## **PERUMUSAN STRATEGI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG**

**Arip Rahman Sudrajat, Asep Sumaryana, Raden Ahmad Buchari, Tahjan  
Tahjan**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengenai perumusan strategi dalam mengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. Permasalahan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang adalah dalam perumusan strategi masih belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kondisi dan situasi faktual, masih rendahnya pengetahuan para pengusaha/pedagang mengenai produk dan strategi pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang pada saat ini belum sesuai dengan elemen pada manajemen strategis secara utuh, karena para pimpinan belum memiliki analisis yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki khususnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian itu sendiri, serta belum memberdayakan keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikaitkan dengan tantangan lingkungan, dan belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan Pasar Tradisional dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

**Kata kunci** : Perumusan startegi, pengelolaan, pasar tradisional, Kabupaten Sumedang

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 6, No 1 (2018)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v6i1.1600](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1600)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1600>

# **STATUS KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DI KOTA MEDAN**

**Agung Suharyanto**

## **ABSTRAK**

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dihubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Dalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara merupakan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Warga Negara dengan warga lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarganegaraan etnis Tionghoa setelah adanya UU No.12 tahun 2006 dan pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 pada etnis Tionghoa. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan cara observasi dan penyebaran angket. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 285 KK dan sampel yang ditentukan adalah sebesar 20% dari jumlah populasi yaitu 57 KK. Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan setelah lahirnya atau adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masyarakat etnis Tionghoa di Lingkungan VII Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan memiliki status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**Kata kunci** : Warga Negara, Etnis, Tionghoa, Kota Medan

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 3, No 2 (2015)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v3i2.903](https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i2.903)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/903>

# **ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN**

**Maradona Sitompul, Anggreini Atmey Lubis**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini menyajikan apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mendukung perealisasi pembangunan di Kota Medan. Berupa pajak daerah, retribusi daerah yang terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan lain-lain PAD yang sah. Kesempatan yang diberikan untuk mengelola sumber pendapatan daerah khususnya mengelola pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu tujuan pembangunan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan juga usaha suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat atas subsidi. Dengan adanya kemandirian tersebut, maka suatu daerah bebas menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk pendanaan pembangunan daerah, karena pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan seluruh potensi daerah termasuk potensi manusia, potensi alam, teknologi dan mencakup semua aspek kehidupan serta penghidupan yang ada di daerah tersebut dilakukan secara berencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

**Kata kunci** : Analysis, Sources, Locally-generated revenue, Capital Development

**Nama Jurnal** : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

**Volume** : 1, No 1 (2013)

**Doi** : [10.31289/jppuma.v1i1.547](https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.547)

**Link pdf** : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547>